



Wacana Menyulam Damai di Tengah Konflik Agraria Lampung

Rifki Alanudin^{1*}, Sierta Putri Nurika², Ibrahim Besar³

¹⁻³Universitas Lampung, Indonesia

*Penulis Korespondensi: 2426031016@students.unila.ac.id

Abstract. Agrarian conflicts in Lampung illustrate that land disputes are not only about ownership but also about how language shapes public perceptions of power and justice. This study aims to explain the changing patterns of media reporting on agrarian conflicts and the social meanings emerging from these changes. The research uses a descriptive qualitative approach with Fairclough's critical discourse analysis and Lederach's conflict transformation theory. Data were obtained from online news reports on agrarian conflicts in Lampung published between 2010 and 2025. The results show that earlier reports emphasized control and security, while later coverage shifted toward issues of justice, land rights, and community recognition. This change indicates that language in media reporting plays a crucial role in transforming public perspectives from a logic of authority toward a consciousness of justice and humanity. The study highlights the importance of fair and empathetic public communication as a foundation for peaceful and sustainable conflict resolution.

Keywords: Agrarian Conflict; Justice; Lampung; Language; Public Communication.

Abstrak. Konflik agraria di Lampung menunjukkan bahwa persoalan tanah tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan, tetapi juga dengan cara bahasa membentuk pandangan tentang kekuasaan dan keadilan. Penelitian ini bertujuan menjelaskan perubahan cara pemberitaan media menggambarkan konflik agraria serta makna sosial yang muncul dari perubahan tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan analisis wacana kritis model Norman Fairclough dan teori transformasi konflik dari John Paul Lederach. Data diperoleh dari berita daring tentang konflik agraria di Lampung yang terbit pada periode 2010–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberitaan awal lebih menekankan aspek penertiban dan keamanan, sedangkan pemberitaan berikutnya mengarah pada isu keadilan, hak atas tanah, dan pengakuan terhadap masyarakat terdampak. Perubahan ini memperlihatkan bahwa bahasa dalam pemberitaan berperan penting dalam menggeser cara pandang masyarakat dari logika kekuasaan menuju kesadaran akan keadilan dan kemanusiaan. Penelitian ini menegaskan pentingnya komunikasi publik yang adil, empatik, dan berorientasi pada penyelesaian damai..

Kata kunci: Bahasa; Keadilan; Komunikasi Publik; Konflik Agraria; Lampung.

1. LATAR BELAKANG

Konflik agraria di Indonesia terus menjadi isu sosial yang kompleks dan berulang, mencerminkan ketimpangan struktural dalam penguasaan lahan, lemahnya pelaksanaan reforma agraria, dan tumpang tindih kebijakan kepemilikan. Berdasarkan laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA, 2024), sepanjang tahun 2023 terjadi 2.939 kasus konflik dengan luasan lebih dari 6,7 juta hektare yang melibatkan sekitar 1,5 juta rumah tangga terdampak. Provinsi Lampung merupakan salah satu wilayah dengan tingkat konflik tinggi, terutama di kawasan Mesuji dan Tulang Bawang, di mana bentrokan antara masyarakat adat, perusahaan perkebunan, dan aparat negara berlangsung berulang sejak 2010. Konflik tersebut tidak hanya menimbulkan kekerasan fisik, tetapi juga menciptakan pertarungan simbolik dalam ruang publik, di mana bahasa dan wacana menjadi instrumen penting dalam membentuk persepsi, legitimasi, dan moralitas sosial (Permana et al., 2024).

Dalam pemberitaan media, konflik agraria Lampung menunjukkan dinamika representasi yang signifikan. Pada awal tahun 2010-an, media arus utama seperti Kompas dan Tempo cenderung menonjolkan narasi negara dengan diksi seperti “penertiban” dan “pengamanan,” yang menegaskan peran negara sebagai penjaga ketertiban. Namun, setelah 2015, muncul pergeseran representasi melalui media alternatif seperti Mongabay dan Lampost, yang menekankan dimensi keadilan, hak ulayat, dan suara masyarakat adat. Perubahan ini menunjukkan bahwa konflik agraria tidak hanya merupakan persoalan material, tetapi juga arena ideologis tempat legitimasi negara dan resistensi rakyat dipertarungkan melalui bahasa.

Kajian sebelumnya menyoroti keterkaitan antara wacana media dan legitimasi kekuasaan. (Puspita, 2019) menemukan bahwa media nasional cenderung memperkuat narasi negara melalui framing legalistik, sedangkan (Nugroho, 2021) menegaskan adanya resistensi moral dalam narasi media alternatif. (Prasetyo & Widodo, 2020) menekankan peran media lokal sebagai ruang artikulasi identitas masyarakat adat, sementara (Hartati, 2022) menunjukkan bias sumber dalam pemberitaan konflik agraria. Studi internasional seperti (Jones, 2017) di Filipina serta (Escobar & Stokke, 2018) di Kolombia juga memperlihatkan bahwa transformasi sosial sering diawali oleh perubahan bahasa media.

Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih menempatkan media semata sebagai instrumen representasi kekuasaan tanpa melihat potensi bahasa sebagai medium transformasi sosial. Di sinilah letak kebaruan penelitian ini, yaitu mengintegrasikan Critical Discourse Analysis (CDA) model Norman Fairclough dengan teori Transformasi Konflik dari John Paul Lederach. Pendekatan ini tidak hanya menjelaskan bagaimana wacana dibentuk, tetapi juga bagaimana bahasa berperan sebagai sarana komunikasi pengakuan dan perubahan relasi sosial.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana strategi komunikasi konflik agraria di Lampung dikonstruksi melalui wacana media dan bagaimana pergeseran wacana tersebut merefleksikan transformasi sosial dari legitimasi negara menuju pengakuan rakyat. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkaya kajian komunikasi konflik dengan menekankan peran bahasa sebagai fondasi bagi perdamaian sosial yang berkeadilan dan partisipatif.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini berlandaskan dua kerangka teoretis utama, yaitu Critical Discourse Analysis (CDA) yang dikembangkan oleh Norman Fairclough dan teori Transformasi Konflik yang dikemukakan oleh John Paul Lederach. Keduanya dipilih karena mampu menjelaskan hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan perubahan sosial dalam konteks komunikasi konflik

agraria. CDA memandang bahasa sebagai praktik sosial yang tidak netral; ia berperan dalam membentuk, mempertahankan, sekaligus menantang struktur kekuasaan (Fairclough, 2013). Pendekatan ini menempatkan wacana sebagai arena ideologis di mana relasi sosial dinegosiasikan melalui praktik linguistik. Fairclough membagi analisis wacana ke dalam tiga dimensi teks, praktik wacana, dan praktik sosial yang saling berhubungan dalam mereproduksi atau mengubah tatanan sosial (Veronica & Abrian, 2024).

Dalam konteks konflik agraria, CDA berguna untuk mengidentifikasi bagaimana bahasa media digunakan untuk melegitimasi otoritas negara sekaligus mengonstruksi posisi masyarakat adat. Struktur sintaksis, pilihan diksi, dan metafora menjadi indikator penting dalam melihat ideologi yang tersembunyi di balik teks (Sukma et al., 2025). Bahasa dalam media sering kali menjadi alat hegemoni yang bekerja melalui repetisi simbolik dan normalisasi makna (Wodak & Meyer, 2016). Oleh karena itu, analisis terhadap wacana media tidak hanya mengungkap representasi, tetapi juga praktik kekuasaan yang melekat dalam produksi pengetahuan publik.

Sementara itu, teori Transformasi Konflik dari Lederach memberikan dimensi relasional dan etis yang melengkapi pendekatan CDA. Lederach menekankan bahwa konflik tidak semata-mata harus diselesaikan, melainkan diubah melalui komunikasi yang berlandaskan pengakuan, empati, dan imajinasi moral (Lederach, 2005). Dalam pandangan ini, bahasa memiliki peran kunci dalam membangun hubungan sosial yang baru di luar logika dominasi dan kekerasan. Pergeseran bahasa dari diksi koersif menuju bahasa pengakuan dipahami sebagai indikator transformasi sosial yang mendalam.

Integrasi antara CDA dan teori Transformasi Konflik menghasilkan pendekatan analisis yang lebih komprehensif: CDA menjelaskan struktur ideologis bahasa, sedangkan teori Lederach memberikan kerangka normatif tentang bagaimana komunikasi dapat menjadi sarana perdamaian. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengungkap bagaimana wacana media memproduksi legitimasi, tetapi juga bagaimana perubahan bahasa dapat memediasi relasi sosial yang lebih setara.

Beberapa penelitian sebelumnya mendukung pentingnya pendekatan ini. (Puspita, 2019) menunjukkan bahwa media nasional sering memperkuat legitimasi negara melalui narasi hukum. (Nugroho, 2021) menemukan pola resistensi moral dalam media alternatif melalui narasi hak atas tanah dan tanah leluhur. (Prasetyo & Widodo, 2020) menyoroti fungsi media lokal sebagai ruang artikulasi identitas masyarakat adat, sementara (Hartati, 2022) mencatat bahwa media sering gagal menjadi ruang dialog karena bias sumber berita. Penelitian internasional oleh (Jones, 2017) di Filipina dan (Escobar & Stokke, 2018) di Kolombia

menegaskan bahwa perubahan bahasa media dapat menjadi tanda awal transformasi sosial pascakonflik.

Dari berbagai temuan tersebut, terlihat bahwa kajian wacana konflik agraria umumnya berfokus pada aspek representasi, namun belum banyak yang mengaitkan bahasa dengan proses transformasi sosial. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menggabungkan analisis ideologis dan pendekatan relasional. Hipotesis konseptual yang mendasari penelitian ini adalah bahwa pergeseran wacana media dari bahasa koersif menuju bahasa pengakuan mencerminkan perubahan relasi kekuasaan menuju komunikasi yang lebih dialogis dan partisipatif.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain Critical Discourse Analysis (CDA) model Norman Fairclough yang dikombinasikan dengan teori Transformasi Konflik dari John Paul Lederach. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap keterkaitan antara bahasa, kekuasaan, dan perubahan sosial melalui analisis terhadap praktik komunikasi publik. Penelitian kualitatif berorientasi pada pemahaman makna sosial, bukan sekadar pengukuran fenomena, sehingga relevan untuk kajian wacana media dan relasi kekuasaan (Jahrir et al., 2025).

Populasi penelitian mencakup teks berita daring mengenai konflik agraria di Provinsi Lampung selama periode 2010–2025. Sampel diambil secara purposive dari media nasional seperti Kompas dan Tempo, serta media lokal dan alternatif seperti Mongabay dan Lampost, berdasarkan relevansi terhadap isu legitimasi negara dan perlawanan masyarakat adat. Data sekunder diperoleh dari laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dokumen advokasi sipil, dan pernyataan pemerintah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi digital dan seleksi teks dengan kata kunci (Alanudin et al., 2025). Analisis dilakukan mengikuti tiga dimensi CDA Fairclough: analisis teks, praktik wacana, dan praktik sosial. Validitas dijaga melalui triangulasi sumber dan teori sebagaimana disarankan oleh (Creswell, 2023), dengan interpretasi dilakukan secara reflektif berdasarkan konteks sosial dan posisi peneliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Lampung, khususnya di wilayah Mesuji dan Tulang Bawang yang menjadi pusat konflik agraria antara masyarakat adat, perusahaan perkebunan, dan aparat negara. Pengumpulan data dilakukan sepanjang tahun 2024 hingga pertengahan 2025 dengan menelusuri pemberitaan daring pada media nasional dan lokal yang terbit dalam rentang waktu 2010–2025. Proses pengumpulan data meliputi penelusuran arsip digital melalui Kompas, Tempo, Mongabay, dan Lampost, serta verifikasi silang menggunakan laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan dokumen advokasi masyarakat sipil. Setiap teks yang dikumpulkan diseleksi berdasarkan kesesuaian tema dengan isu legitimasi negara dan perlawanan masyarakat adat, lalu diklasifikasikan menurut periode waktu untuk menelusuri pergeseran wacana.

Hasil analisis menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam cara media mengonstruksi konflik agraria di Lampung. Pada periode awal (2010–2014), wacana didominasi oleh bahasa koersif yang menegaskan kekuasaan negara, sedangkan setelah 2015 terjadi pergeseran menuju bahasa moral dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat. Pergeseran ini tampak dalam struktur linguistik dan pilihan diksi media sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Pergeseran Representasi Bahasa dalam Pemberitaan Konflik Agraria di Lampung (2010–2025)

Periode	Jenis Media	Dominasi Diksi	Karakter Wacana	Representasi Sosial
2010-2014	Kompas, Tempo	Penertiban, pengamanan, perambah liar	Legalistik, koersif	Negara sebagai penegak hukum
2015–2020	Mongabay, Lampost	Tanah adat, hak ulayat, keadilan sosial	Moral, historis	Masyarakat adat sebagai subjek hak
2021–2025	Media campuran	Dialog, partisipasi, reforma agraria	Reflektif, partisipatif	Negara dan rakyat dalam posisi negosiasi

Sumber: hasil analisis korpus teks media daring, 2025.

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa wacana media tidak bersifat statis, melainkan mengalami reartikulasi makna seiring dinamika sosial dan politik. Pergeseran wacana menunjukkan bahwa legitimasi negara mulai diimbangi oleh moralitas rakyat dalam ruang publik. Untuk memperjelas dimensi linguistik dari perubahan tersebut, Tabel 2 menampilkan perbandingan diksi, metafora, dan struktur kalimat antara media nasional dan media lokal/alternatif.

Tabel 2. Perbandingan Diksi dan Metafora antara Media Nasional dan Lokal.

Aspek Linguistik	Media Nasional (Kompas, Tempo)	Media Lokal/Alternatif (Mongabay, Lampost)	Makna Ideologis
Diksi	“Penertiban kawasan hutan”, “perambah liar diamankan”	“Petani mempertahankan ruang hidup”, “tanah leluhur digusur”	Pergeseran dari bahasa kontrol menuju bahasa pengakuan
Metafora	“Menjaga ketertiban sosial”	“Melindungi warisan leluhur	Transformasi simbolik dari legalitas ke moralitas
Struktur Kalimat	Kalimat pasif meniadakan pelaku (“warga diamankan”)	Kalimat aktif menegaskan subjek rakyat (“petani menolak penggusuran”)	Pergeseran agensi dari negara ke masyarakat

Sumber: hasil analisis linguistik CDA Fairclough, 2025.

Kedua tabel tersebut menjadi dasar untuk memahami arah transformasi wacana media dari periode 2010 hingga 2025. Secara umum, terlihat bahwa representasi konflik agraria mengalami pergeseran dari narasi koersif menuju narasi pengakuan, yang selanjutnya dijelaskan lebih rinci pada bagian berikutnya.

Bahasa dan Kekuasaan dalam Konflik Agraria

Dalam analisis wacana kritis, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, melainkan sebagai medan ideologis tempat kekuasaan dan makna diproduksi (Firdaus et al., 2024). Sejalan dengan pandangan Fairclough, teks adalah praktik sosial yang merefleksikan serta membentuk relasi kuasa di masyarakat (Fairclough, 2013). Bahasa dalam pemberitaan konflik agraria di Lampung memperlihatkan bagaimana media menjadi arena perebutan legitimasi antara negara dan rakyat dalam kurun 2010–2025. Pergeseran diksi, struktur kalimat, serta metafora yang digunakan menggambarkan perubahan cara berpikir tentang tanah, hak, dan keadilan.

Pada periode awal (2010–2014), teks berita di media nasional seperti Kompas dan Tempo menunjukkan dominasi narasi negara melalui pilihan kata yang legalistik dan koersif. Kata-kata seperti penertiban, pengamanan, perambah liar, dan ketertiban sosial digunakan berulang kali untuk menggambarkan tindakan aparat dan kebijakan pemerintah. Dalam kerangka Wodak dan Meyer, repetisi semacam ini bukanlah kebetulan, melainkan strategi ideologis yang menormalisasi kekuasaan Negara (Wodak & Meyer, 2016). Bahasa bekerja untuk menciptakan efek legitimasi, negara tampil sebagai pelindung hukum dan ketertiban, sedangkan masyarakat diposisikan sebagai pelanggar.

Secara gramatikal, struktur sintaksis memperkuat relasi kuasa tersebut. Kalimat aktif seperti “pemerintah menertibkan kawasan hutan” memusatkan agensi pada negara, sementara kalimat pasif seperti “sejumlah warga diamankan” meniadakan subjek pelaku. Baker menyebut fenomena ini sebagai *agency suppression*, yaitu upaya linguistik untuk mengatur persepsi publik tentang siapa yang memiliki kendali atas tindakan sosial (Baker, 2022). Dalam konteks

ini, teks berita berfungsi untuk mereproduksi hierarki kekuasaan melalui struktur bahasa yang tampak netral, padahal sarat ideologi (Pamungkas et al., 2024).

Namun, sejak 2015 terjadi pergeseran signifikan dalam penggunaan bahasa media. Muncul istilah baru seperti tanah adat, hak ulayat, penggusuran, dan keadilan sosial yang membawa dimensi moral dan historis. Pergeseran semantik ini menunjukkan adanya *interdiscursivity* (Fairclough, 2013), yakni percampuran antara wacana legal-formal dengan wacana moral rakyat. Media yang sebelumnya mengulang narasi negara kini mulai memberi ruang bagi wacana keadilan agraria yang lebih humanistik. Perubahan ini menandai pergeseran ideologi dari pembangunan dan stabilitas menuju hak dan keadilan.

Dalam perspektif Lederach, perubahan bahasa semacam ini dapat dipahami sebagai bagian dari proses transformasi konflik. Ia menekankan bahwa resolusi konflik berkelanjutan selalu dimulai dari perubahan cara berkomunikasi, terutama melalui bahasa yang menciptakan pengakuan dan empati (Lederach, 2005). Pergeseran diksi dari “penertiban” ke “keadilan” atau dari “perambah” ke “petani” mengindikasikan pergeseran komunikasi dari bahasa kontrol menuju bahasa pengakuan. Dalam konteks konflik agraria, transformasi semacam ini menunjukkan perubahan relasi sosial yang lebih mendalam, konflik tidak lagi dibingkai sebagai ancaman keamanan, melainkan sebagai pencarian makna keadilan.

Metafora yang digunakan dalam teks berita juga memperkuat perubahan ideologis tersebut. Dalam beberapa liputan Mongabay dan Lampost (2015–2020), masyarakat adat digambarkan sebagai pihak yang “mempertahankan warisan leluhur” atau “menjaga ruang hidup.” Metafora warisan dan ruang hidup berfungsi mengganti narasi kriminalisasi menjadi narasi moral. Menurut Fairclough, perubahan metafora adalah bentuk *re-semanticization of reality*, cara baru untuk memandang dunia sosial. Bahasa bukan hanya mendeskripsikan realitas, tetapi juga membentuknya (Fairclough, 2013).

Selain itu, variasi sumber berita menunjukkan adanya diversifikasi suara. Pada periode awal, teks hanya mengutip aparat dan pejabat, tetapi kemudian mulai mengangkat suara organisasi sipil dan tokoh adat. Perubahan sumber ini turut memengaruhi pilihan kata dalam berita. Wodak dan Meyer menyebut fenomena ini sebagai *textual heterogeneity*, di mana keragaman sumber melahirkan keragaman ideologis (Wodak & Meyer, 2016). Hasilnya, teks berita tidak lagi sepenuhnya menjadi instrumen kekuasaan, tetapi juga wadah artikulasi moral rakyat.

Dari sudut pandang teori transformasi konflik, pergeseran bahasa dan sumber tersebut memperlihatkan apa yang disebut Lederach sebagai “perubahan dari sistem dominasi menuju relasi dialogis.” Dalam situasi ini, bahasa menjadi jembatan antara dua dunia nilai, legalitas

negara dan moralitas masyarakat (Lederach, 2005). Proses pengakuan ini merupakan fondasi dari *peace communication*, yaitu komunikasi yang tidak lagi berorientasi pada kontrol, melainkan pada saling memahami (Rehutomo, 2022).

Secara keseluruhan, dimensi teks menunjukkan bahwa konflik agraria di Lampung merupakan pertarungan makna yang berlangsung di dalam bahasa. Pilihan diksi, struktur kalimat, dan metafora mencerminkan pergulatan antara legitimasi negara dan resistensi rakyat. Melalui analisis wacana kritis Fairclough, terlihat bahwa bahasa tidak pernah netral; ia menjadi medium reproduksi dan transformasi sosial. Pergeseran dari bahasa koersif menuju bahasa moral menandai transformasi ideologis yang selaras dengan prinsip Lederach tentang resolusi konflik berbasis pengakuan.

Dengan demikian, teks media bukan sekadar produk jurnalisme, melainkan arena simbolik tempat perubahan sosial dimulai. Dalam konflik agraria Lampung, bahasa menjadi medan legitimasi yang memperlihatkan evolusi komunikasi, dari wacana kekuasaan menuju wacana kemanusiaan. Seperti ditegaskan Fairclough setiap perubahan sosial yang bermakna selalu diawali oleh perubahan dalam cara kita berbicara tentang dunia (Fairclough, 2013).

Media dan Perebutan Makna Konflik Agraria

Dalam kerangka analisis wacana kritis Fairclough, praktik wacana menempati posisi penting sebagai penghubung antara teks dan struktur sosial. Ia menggambarkan bagaimana teks diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi dalam konteks sosial yang spesifik (Fitriani & Abrar, 2025). Dalam konteks konflik agraria di Lampung, praktik wacana media menunjukkan dinamika yang kompleks, media berperan bukan sekadar penyampai informasi, tetapi juga aktor sosial yang memediasi pertarungan ideologi antara negara dan rakyat.

Pada periode 2010–2014, pola produksi berita cenderung memusat pada sumber-sumber resmi pemerintah daerah, aparat keamanan, dan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU). Framing yang dibangun media arus utama seperti Kompas dan Tempo merefleksikan praktik *asymmetrical discourse production* (van Leeuwen, 2016), di mana sumber dominan memperoleh otoritas simbolik lebih besar dibandingkan masyarakat lokal. Situasi ini menegaskan pandangan Fairclough bahwa media sering kali menjadi bagian dari mekanisme hegemoni, bukan hanya arena wacana netral (Droz-dit-Busset, 2022). Dalam kondisi demikian, makna konflik dibentuk dari sudut pandang kekuasaan, bukan keadilan.

Namun sejak pertengahan dekade 2010-an, terjadi perubahan dalam struktur produksi dan konsumsi wacana media. Laporan dari Mongabay dan Lampost mulai menampilkan narasi alternatif yang menyoroti penderitaan masyarakat adat, kriminalisasi petani, dan lemahnya reforma agraria. Proses ini menunjukkan munculnya konter hegemoni bentuk produksi makna

yang menantang dominasi negara. Dalam istilah Fairclough , praktik semacam ini memperlihatkan proses “reartikulasinya” wacana, di mana media menjadi ruang terbuka bagi pertarungan simbolik antaraktor sosial (Angga Denilza & Muzakir, 2025).

Keterlibatan media dalam menampilkan suara masyarakat sipil juga dapat dibaca sebagai upaya menuju *discursive democratization*, yakni keterbukaan terhadap pluralitas sumber dan perspektif. Menurut Wodak dan Meyer, proses ini merupakan indikator penting bagi praktik jurnalisme yang kritis terhadap kekuasaan (Wodak & Meyer, 2016). Dalam kasus Lampung, pluralisasi sumber berita memunculkan dinamika baru dalam produksi makna: negara tidak lagi menjadi satu-satunya penafsir realitas, karena masyarakat pun mulai menuturkan kisah mereka sendiri.

Dalam kerangka resolusi konflik Lederach, perubahan ini menggambarkan pergeseran dari *communication of control* menuju *communication of recognition* (Lederach, 2005). Media menjadi arena negosiasi makna, tempat kedua pihak belajar memahami posisi satu sama lain melalui representasi simbolik. Lederach menekankan bahwa transformasi konflik tidak dimulai dari negosiasi politik, melainkan dari *proses relational communication* ketika pihak yang berkonflik mengubah cara mereka berinteraksi dan berbicara . Dalam konteks ini, produksi berita yang memberi ruang bagi suara petani, LSM, dan tokoh adat menunjukkan adanya relational shift menuju komunikasi transformatif.

Selain dalam produksi, perubahan juga terjadi pada tahap distribusi dan konsumsi wacana. Media daring dan media sosial memperluas jangkauan konflik ke publik nasional, menciptakan *discursive chain* antara berita lokal, narasi masyarakat, dan tanggapan publik (Sukma et al., 2025). Pola ini menandakan terjadinya *recontextualization* makna, peristiwa lokal di Lampung menjadi isu nasional tentang keadilan agraria. Reartikulasi makna semacam ini memperlihatkan bagaimana media berperan sebagai jembatan ideologis antara negara, rakyat, dan masyarakat luas.

Namun, perubahan ini tidak terjadi secara linear. Di tengah kemunculan wacana tandingan, negara juga mengadopsi strategi *appropriation of discourse* mengambil sebagian elemen bahasa keadilan untuk mempertahankan legitimasi (Fairclough, 2013). Misalnya, istilah “reforma agraria” atau “komunikasi pemerintah dengan masyarakat” mulai digunakan oleh pejabat untuk menampilkan citra partisipatif. Dalam pandangan Fairclough, ini adalah bentuk *discursive accommodation*, di mana kekuasaan mempertahankan dominasi dengan menyerap bahasa resistensi. Meskipun tampak terbuka, strategi ini sering kali menghasilkan dialog semu, karena relasi kuasa tetap tidak setara (Fairclough, 2013) .

Keterbatasan inilah yang disebut Lederach sebagai partial transformation tahap awal perubahan komunikasi yang belum sepenuhnya merombak struktur kekuasaan, tetapi membuka kemungkinan bagi relasi baru (Lederach, 2005). Dalam praktiknya, media memainkan peran ambivalen, di satu sisi menjadi alat legitimasi negara, di sisi lain membuka ruang artikulasi bagi masyarakat sipil. Ambivalensi ini tidak menandakan kegagalan, melainkan menunjukkan dinamika proses transformasi sosial yang masih berlangsung.

Dengan demikian, praktik wacana media dalam konflik agraria di Lampung mencerminkan negosiasi terus-menerus antara hegemoni dan resistensi. Media bukan lagi sekadar saluran komunikasi, tetapi menjadi ruang simbolik di mana nilai-nilai keadilan, legalitas, dan moralitas beradu (Otmakhova & Frermann, 2025). Dalam bahasa Fairclough, praktik wacana adalah “mekanisme ideologis” yang menentukan arah perubahan sosial melalui distribusi makna (Fairclough, 2013). Sedangkan dalam kerangka Lederach, praktik ini merepresentasikan bentuk transformasi komunikasi, yakni menumbuhkan kesadaran baru dan memperluas kapasitas sosial untuk berdialog.

Maka, disini media berperan ganda dalam dinamika konflik agraria Lampung, sebagai aparat ideologis negara dan sekaligus arena dialog moral masyarakat. Perubahan praktik wacana menunjukkan bahwa konflik tidak hanya dimenangkan di lapangan, tetapi juga di ruang simbolik di mana makna diproduksi dan dinegosiasikan. Melalui pembacaan CDA Fairclough dan teori transformasi konflik Lederach, dapat dipahami bahwa transformasi sosial berawal dari transformasi wacana ketika komunikasi bergeser dari kontrol menuju pengakuan.

Wacana dan Perubahan Sosial di Lampung

Dalam kerangka analisis wacana kritis, Fairclough menempatkan praktik sosial sebagai dimensi paling luas dalam analisis, tahap di mana bahasa dihubungkan dengan struktur sosial, ideologi, dan perubahan kekuasaan. Bahasa bukan sekadar alat representasi, tetapi mekanisme yang beroperasi dalam sistem sosial dan politik yang kompleks. Dalam konteks konflik agraria di Lampung, wacana media mencerminkan bukan hanya pertentangan makna, melainkan pertarungan ideologi antara hegemoni negara dan resistensi rakyat. Pergeseran bahasa dan praktik komunikasi yang ditemukan dalam teks dan praktik wacana memperlihatkan bagaimana relasi kuasa dapat ditantang dan diubah melalui transformasi simbolik.

Sejak awal dekade 2010-an, konflik agraria di Lampung diartikulasikan dalam kerangka pembangunan, stabilitas, dan keamanan nasional. Negara melalui media mengonstruksi wacana tentang “ketertiban sosial” dan “penegakan hukum,” yang menegaskan posisi pemerintah sebagai pengelola tunggal sumber daya agraria. Wacana ini mencerminkan apa yang disebut Fairclough sebagai *ideological reproduction*, proses di mana praktik diskursif

memperkuat tatanan sosial yang ada dengan memproduksi legitimasi simbolik bagi kekuasaan (Fairclough, 2013). Dalam situasi ini, konflik bukan dipahami sebagai ketimpangan struktural, tetapi sebagai deviasi dari hukum dan ketertiban.

Namun, pada periode 2015–2025, struktur wacana tersebut mengalami gangguan ideologis. Masyarakat sipil dan media alternatif mulai memproduksi narasi tandingan yang menekankan hak atas tanah, ketimpangan agraria, dan pengabaian sejarah. Pergeseran ini menandai peralihan dari wacana pembangunan menuju wacana keadilan sosial. Menurut Wodak dan Meyer, dinamika ini menggambarkan munculnya hegemoni tandingan yang berfungsi sebagai “medan resistensi terhadap ideologi dominan.” Media tidak lagi menjadi perpanjangan tangan negara, melainkan arena publik tempat wacana tandingan memperoleh ruang artikulasi (Wodak & Meyer, 2016).

Dalam kerangka teori transformasi konflik Lederach, perubahan ini menandai fase transformasi sosial melalui bahasa. Lederach menekankan bahwa perdamaian yang berkelanjutan tidak lahir dari penghapusan konflik, tetapi dari kemampuan masyarakat untuk mengubah makna dan hubungan yang mendasari konflik itu (Lederach, 2005). Dalam hal ini, perubahan bahasa dari penertiban ke pengakuan mencerminkan upaya transformasi hubungan sosial dari dominasi menuju pengakuan timbal balik. Bahasa berfungsi sebagai medium menjalin perdamaian, tempat keadilan dinegosiasikan bukan hanya melalui kebijakan, tetapi melalui simbol dan narasi publik.

Transformasi ini juga terlihat dari bagaimana negara berusaha menyesuaikan diri dengan munculnya wacana moral rakyat. Dalam beberapa pernyataan publik, istilah seperti reforma agraria dan dialog dengan masyarakat mulai diadopsi oleh pejabat negara. Fairclough menyebut fenomena ini sebagai *recontextualization*, yakni strategi kekuasaan untuk mempertahankan legitimasi dengan menyerap sebagian elemen wacana tandingan. Namun, adopsi tersebut sering kali bersifat kosmetik, komunikasi yang tampak partisipatif tetap beroperasi dalam struktur kuasa hierarkis. Di sinilah perbedaan antara manajemen dan transformasi menjadi jelas yang pertama menekan gejala, sedangkan yang kedua mengubah akar hubungan sosial (Lederach, 2005).

Dengan demikian, praktik sosial dalam konflik agraria Lampung memperlihatkan dialektika antara reproduksi dan transformasi. Di satu sisi, negara menggunakan bahasa untuk mempertahankan hegemoni simbolik, di sisi lain, masyarakat sipil menggunakan bahasa sebagai alat resistensi dan penciptaan makna baru. Dalam istilah Fairclough, ini merupakan bentuk *discursive struggle*, yaitu proses di mana wacana menjadi medan perebutan makna

sosial. Hasilnya bukan kemenangan salah satu pihak, melainkan pembentukan tatanan komunikasi baru yang lebih reflektif dan partisipatif.

Perubahan ini juga membawa implikasi terhadap konsep legitimasi sosial. Jika legitimasi sebelumnya bersumber dari otoritas hukum, kini ia bergeser menuju moralitas publik. (Baker, 2022) menegaskan bahwa dalam masyarakat pasca-modern, legitimasi ideologis semakin banyak dibangun melalui narasi, bukan institusi. Dalam konteks Lampung, hal ini terlihat dari meningkatnya peran advokasi sipil, tokoh adat, dan media alternatif dalam mempengaruhi opini publik tentang keadilan agraria. Mereka bukan hanya menantang struktur kekuasaan, tetapi juga membangun epistemologi baru tentang tanah sebagai ruang kehidupan, bukan sekadar komoditas ekonomi.

Lebih jauh, pergeseran wacana ini memperlihatkan bagaimana bahasa dapat berfungsi sebagai alat penyembuhan sosial. Lederach menjelaskan konsep *moral imagination* kemampuan kolektif untuk membayangkan hubungan baru yang melampaui konflik. Dalam konflik agraria, munculnya istilah seperti ruang hidup, hak sejarah, dan tanah leluhur adalah contoh nyata dari *moral imagination* yang membingkai kembali konflik bukan sebagai pertentangan kepentingan, tetapi sebagai perjuangan kemanusiaan (Lederach, 2005). Dalam kerangka CDA Fairclough, bahasa seperti ini berperan sebagai praktik sosial yang mampu mengubah kesadaran kolektif, membentuk solidaritas, dan membuka ruang bagi rekonsiliasi simbolik (Azizah, 2024).

Secara keseluruhan, dimensi praktik sosial mengungkap bahwa konflik agraria di Lampung bukan sekadar persoalan hukum atau ekonomi, melainkan konflik wacana dan legitimasi sosial. Bahasa menjadi medan utama pertarungan antara kekuasaan dan keadilan, tetapi sekaligus menjadi jembatan bagi transformasi sosial. Ketika wacana negara dan rakyat mulai saling menyerap unsur satu sama lain, muncul kemungkinan terbentuknya komunikasi baru yang lebih reflektif dan dialogis bentuk awal dari perdamaian yang dibangun di atas pengakuan, bukan dominasi. Sebagaimana ditegaskan Lederach, “transformasi sejati terjadi ketika bahasa kekuasaan berubah menjadi bahasa pengakuan.”

Dengan demikian, praktik sosial dalam wacana agraria di Lampung menunjukkan perubahan dari pola komunikasi yang berpusat pada negara menuju pola komunikasi yang berorientasi pada masyarakat. Dalam proses tersebut, media, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga negara berperan bersama dalam membangun bentuk wacana baru yang lebih terbuka, etis, dan partisipatif. Bahasa dalam konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai cerminan dari perubahan sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun pemahaman bersama dan menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk dan mengubah hubungan sosial dalam konflik agraria di Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberitaan media mengalami pergeseran makna dan posisi ideologis. Pada awal periode penelitian (2010–2014), media nasional seperti Kompas dan Tempo cenderung menggunakan bahasa yang menegaskan kekuasaan negara melalui istilah hukum, ketertiban, dan penegakan aturan. Sebaliknya, sejak 2015, media lokal dan alternatif seperti Mongabay dan Lampost mulai menampilkan bahasa yang lebih menekankan pada keadilan sosial, hak masyarakat adat, serta pengakuan terhadap pengalaman rakyat. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa bahasa dalam pemberitaan tidak hanya berfungsi untuk menggambarkan realitas sosial, tetapi juga menjadi sarana untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap keadilan dan relasi kekuasaan.

Temuan ini memperlihatkan bahwa penyelesaian konflik agraria tidak cukup dilakukan melalui kebijakan hukum dan administratif, tetapi juga perlu disertai perubahan dalam cara berkomunikasi dan membingkai masalah di ruang publik. Ketika bahasa yang digunakan media bergeser dari penekanan pada kekuasaan menuju pengakuan dan empati, proses penyelesaian konflik dapat bergerak ke arah yang lebih manusiawi dan dialogis. Oleh karena itu, strategi komunikasi dalam penyelesaian konflik agraria sebaiknya diarahkan pada pembentukan ruang komunikasi yang terbuka, setara, dan berorientasi pada keadilan sosial.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada pemberitaan media daring yang membahas konflik agraria di wilayah Lampung, baik dari media nasional maupun lokal. Oleh karena itu, hasil penelitian belum sepenuhnya mencerminkan dinamika wacana di tingkat nasional atau dalam konteks wilayah lain. Penelitian berikutnya disarankan untuk memperluas cakupan ke berbagai daerah dan jenis media, termasuk media sosial, agar dapat menggambarkan perubahan bahasa dan komunikasi konflik secara lebih menyeluruh. Selain itu, penelitian lanjutan dapat menelusuri lebih jauh bagaimana pergeseran bahasa dalam pemberitaan media memengaruhi pembentukan kebijakan agraria dan kesadaran publik mengenai keadilan sosial.

DAFTAR REFERENSI

- Alanudin, R., Trenggono, N., Besar, I., Firman, A., & Putra, P. (2025). *DINAMIKA KOMUNIKASI PUBLIK: CANCEL CULTURE DAN FIGUR AGAMA DI MEDIA SOSIAL*. 16(2), 177–190.
- Angga Denilza, I., & Muzakir, F. (2025). Instagram sebagai Arena Wacana Empati: Analisis Wacana Kritis terhadap Respons Publik atas Kesaksian Korban Film Bid'ah pada Akun @ctd.insider. *Ilmu Komunikasi*, 4(2), 156–170. <https://doi.org/10.54259/mukasi.v4i2.4291>
- Azizah, R. (2024). *Representasi Konsep HablumunaAllah dan Habluminannas dalam Filosofi Udeng Seribu Obor Komunitas Masyarakat Samin Margomulyo, Bojonegoro*. 10(2), 1–23.
- Baker, P. (2022). *Sociolinguistics and critical discourse analysis*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-97888-5>
- Creswell, J. W. (2023). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset* (3rd ed.).
- Droz-dit-Busset, O. (2022). “So-called influencers”: Stancetaking and (de)legitimation in mediatized discourse about social media influencers. *Discourse, Context and Media*, 49(December 2021). <https://doi.org/10.1016/j.dcm.2022.100629>
- Escobar, A., & Stokke, K. (2018). Language, land, and legitimacy: Agrarian discourse and social change in post-conflict Colombia. *Journal of Peacebuilding and Development*, 13(2), 129–144. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1542316618771448>
- Fairclough, N. (2013). *Critical Discourse Analysis* (2nd ed.). Routledge.
- Firdaus, M. R., Dindin, M., & Sidik, H. (2024). *Constructing Religious Legitimacy in the Digital Public Sphere: A Study of Islamic Discourse on Social Media Abstrak*. 6(2), 85–110. <https://doi.org/10.15575/kt.v6i2.33173>
- Fitriani, E., & Abrar, A. N. (2025). KONSTRUKSI SULUK KEBUDAYAAN DALAM MEDIA ALTERNATIF: REPRESENTASI DAKWAH KULTURAL PADA LANGGAR.CO. *Qaulan: Journal of Islamic Communication*, 6(1), 39–59.
- Hartati, L. (2022). Media, wacana, dan konflik agraria di Indonesia: Antara legitimasi dan perlawanan. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 10(1), 55–74.
- Jahrir, A. S., Tahir, M., & Makassar, U. N. (2025). *Bahasa Hak Istimewa dan Krisis Legitimasi: Analisis Wacana Kritis atas Kontroversi Tunjangan Perumahan DPR 2025*. 5(4), 5353–5366.
- Jones, R. (2017). Discourses of development and agrarian conflict in the Philippines. *Media, Culture & Society*, 39(8), 1132–1150. <https://doi.org/10.1093/9780195174542>
- Lederach, J. P. (2005). *The moral imagination: The art and soul of building peace*. Oxford University Press.
- Nugroho, F. (2021). Wacana hak atas tanah dalam media alternatif. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 19(2), 211–227.

- Otmakhova, Y., & Frermann, L. (2025). *Narrative Media Framing in Political Discourse*. <http://arxiv.org/abs/2506.00737>
- Pamungkas, Y. C., Moefad, A. M., & Purnomo, R. (2024). Konstruksi Realitas Sosial di Indonesia dalam Peran Media dan Identitas Budaya di Era Globalisasi. *Metta : Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 4(4), 28–36. <https://doi.org/10.37329/metta.v4i4.3737>
- Permana, R., Trikusumaningtias, I., & Adinugroho, P. (2024). Freedom of Speech di Ruang Virtual: Analisis Wacana Fairclough Pada Kanal Youtube Rocky Gerung Official. *Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika Dan Komunikasi*, 5(3), 3199–3210. <https://doi.org/10.35870/jimik.v5i3.926>
- Prasetyo, A., & Widodo, B. (2020). Identitas dan perlawanan dalam wacana media lokal: Kasus konflik agraria Kalimantan. *Jurnal Komunikasi Global*, 9(2), 135–152.
- Puspita, D. (2019). Framing konflik agraria di media daring nasional. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 17(1), 45–59.
- Rehutomo, J. (2022). Kepemimpinan dan Manajemen Konflik. In *Manajemen Konflik : Strategi Pengelola Konflik dalam Organisasi* (pp. 89–106). Eurika Media Aksara.
- Sukma, I., Widyastutieningrum, S. R., & Mulyana, A. R. (2025). *Art , Ideology , and Language : A Critical Discourse Analysis of Cultural Representation in Anwar Beck ' s Songs*. 6(1), 197–207. <https://doi.org/10.46843/jiecr.v6i1.2233>
- van Leeuwen, T. (2016). *Introducing social semiotics*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203647027>
- Veronica, T. V., & Abrian, R. (2024). *Jenama Internasional di Tengah Konflik : Wacana Kritis Mcdonald ' s Indonesia dan Malaysia dalam Konflik Israel - Palestina*. 15(2), 319–335.
- Wodak, R., & Meyer, M. (2016). *Methods of critical discourse studies*. SAGE Publications.